

ABSTRAK

Pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu dari berbagai usaha pemerintah di dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga kebutuhan bekerja pun meningkatkan dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dimana bekerja menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap masing-masing individu. Seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu penelitian di lakukan di PT Phini Sumber Daya sebagai salah satu penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Semarang. Dimana Tenaga Kerja Indonesia baik formal dan informal cukup populer untuk saat ini, sehingga ditemukana beberapa rumusan masalah yang ada, Seperti, 1)Bagaimanakah perlindungan Hukum bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal di PT Phinisi Sumber Daya Semarang, 2)Hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Phinisi Sumber Daya dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia formal dan informal 3)Bagaimana upaya yang dilakukan PT Phinisi Sumber Daya dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja tersebut. Dimana penelitian dilakuakn dengan bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dalam perjanjian kontrak kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal, identifikasi atas hambatan yang dihapai di PT Phinisi Sumber Daya dalam pelaksanaan kontrak kerja, dan untuk mengetahui upaya dan tindakan yang dilakukan oleh PT Phinisi Sumber Daya dalam menyelesaikan permasalahan.

Metode pendekatan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:1)Perlindungan Hukum bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal di PT Phinisi Sumber Daya Semarang telah dilakukan secara optimal. Baik dalam perlindungan dari dalam dan selama pendidikan maupun proses pembuatan kontrak hubungan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja migrant khususnya tenaga kerja Indonesia formal dan informal.2)Hambatan yang dihadapi oleh PT Phinisi Sumber Daya dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan Informal di luar negeri masih ditemukannya beberapa masalah umum dan sering terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan.3)Dalam upaya yang dilakukan PT Phinisi Sumber Daya dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja, mereka telah mengikuti prosedur yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, dimana mereka telah menjalankan kewajiban dan hak-hak bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal serta menjalin hubungan antara satu sama lain dengan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Formal dan Informal, PT Phinisi Sumber Daya

ABSTRACT

National development in the manpower sector is one of the various government efforts to develop better human resources in Indonesia. So that the need for work increases and develops over time. Where work becomes a necessity to meet the basic needs of each individual. As has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning Human Rights, article 27 paragraph (2) which states, "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity". Therefore, the research was carried out at PT Phini Sumber Daya as one of the suppliers of Indonesian Workers in Semarang. Where Indonesian workers, both formal and informal, are quite popular at this time, so that there are some formulations of the existing problems, such as, 1) How is legal protection for prospective formal and informal Indonesian workers at PT Phinisi Sumber Daya Semarang, 2) What are the obstacles? faced by PT Phinisi Sumber Daya in implementing the work contract agreement for formal and informal Indonesian workers abroad, 3) How is the effort made by PT Phinisi Sumber Daya in resolving obstacles in the implementation of the work contract agreement. Where the research was carried out with the aim of knowing the legal force in the work contract agreement for prospective formal and informal Indonesian workers, identifying the obstacles faced by PT Phinisi Sumber Daya in implementing work contracts, and to knowing the efforts and actions taken by PT Phinisi Sumber Daya. in solving existing problems.

The approach method uses the Normative Juridical method, which is examining library materials which are secondary data by conducting a search of regulations and literature related to the problems being studied

The results showed that: 1) Legal protection for prospective formal and informal Indonesian workers at PT Phinisi Sumber Daya Semarang has been carried out optimally. Both in protection from within and during education as well as in the process of making an employment relationship contract for migrant workers, especially formal and informal Indonesian workers. 2) Barriers faced by PT Phinisi Sumber Daya in implementing work contract agreements for prospective formal and informal Indonesian workers in abroad, there are still some common problems and often occur in the manpower sector. 3) In the efforts made by PT Phinisi Sumber Daya to resolve obstacles in the implementation of work contract agreements, they have followed the procedures that have been regulated in the laws and regulations, where they have fulfilled the obligations and rights of prospective formal and informal Indonesian workers and established relationships between one another and other Indonesian labor service providers.

Key words: Legal Protection, Indonesian workers, Formal and Non-Formal, PT Phinisi Sumber Daya